

SEMINAR NASIONAL TEOLOGI KEBANGSAAN

AGAMA & PERDAMAIAN



SEKOLAH TINGGI GEREJA METHODIST INDONESIA

BANDAR BARU, 13 APRIL 2016

PANCASILA:

ETIKA POLITIK BANGSA INDONESIA

oleh
FRANZ MAGNIS-SUSENO

PENGANTAR

"Etika Politik Kebangsaan" (TOR) memuat petunjuk dan tuntutan bagaimana kebangsaan suatu bangsa harus ditangani. Di Indonesia itu berarti. Kita bertanya: Apa yang menjadi etika politik bangsa Indonesia. Jawabannya jelas, *dasar* segala etika politik bangsa Indonesia adalah *Pancasila*.

Itu perlu diingat kembali. Mengapa? Karena dari banyak omongan Pancasila di Orde Baru dalam masyarakat ada perasaan bahwa Pancasila hanya semacam simbol atau omong-omong saja, tanpa arti nyata, katakan tanpa gigi. Anggapan ini fatal. Tanpa Pancasila bangsa Indonesia tidak akan *survive* dan Pancasila hanya bisa berfungsi kalau kita menyadari bahwa Pancasila mempunyai gigi.

Berikut ini, pertama, mau diperlihatkan betapa penting, bahkan kunci, peran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kedua apa itu Pancasila dan di mana aktualitasnya.

I. MAKNA PANCASILA

Untuk mengerti arti Pancasila kita harus mengingat kekhasan kebangsaan Indonesia.

1. KEBANGSAAN INDONESIA

Indonesia ia bersatu, atau, dengan lain kata, Indonesia itu *ada* karena kebangsaannya. Yang mempersatukan kebhinne-kaan Indonesia di Nusantara adalah kebangsaan. Bahwa "kita semua bangsa Indonesia" itu yang mempersatukan orang "dari Sabang sampai Merauke", orang dari etnik, ras dan orientasi religius yang berbeda. Maka di sini saya ajukan sedikit refleksi atas hakekat kebangsaan Indonesia.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan *Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* Su-karno muda mengingatkan sesuatu yang merupakan kunci untuk mengerti mengapa Indonesia masih berdiri kokoh. Yaitu bahwa kebangsaan Indonesia berwujud perasaan kebersamaan yang lahir dari pengalaman sejarah bersama.

Kebangsaan Indonesia **bukan** kebangsaan **alami**, seperti kebangsaan Korea atau Jerman, yang berdasarkan kesatuan etnik dan bahasa. Kebangsaan alami semacam itu memang kuat, tetapi rawan menjadi syovinistik dan agresif.

Kebangsaan Indonesia, sebaliknya, merupakan **kebangsaan etis**: Artinya, perasaan kebersamaan berdasarkan cita-cita etis luhur yang dimiliki bersama. Pengalaman bersama akan ketertindasan dan keterhinaan karena keadaan terjajah melahirkan solidaritas bangsa melampaui perbedaan suku, etnik dan agama. Kesadaran kebersamaan itu semakin menguat dalam perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Namun kebangsaan Indonesia ada segi yang khas. Di tidak sedikit negara bekas jajahan rasa kebangsaan perlu dipompa dari atas ke dalam masyarakat oleh elit politik, ya elit yang menerima kekuasaan dari penjajah, *sesudah* negara itu *menerima* kemerdekaan. Tak jarang lantas inti kebangsaan itu adalah, sebenarnya, napsu dominasi suatu mayoritas. Dengan akibat bahwa minoritas-minoritas sulit beridentifikasi dengannya. Di sekian banyak negara situasi ini bahkan melahirkan perang saudara berkelanjutan.

Tetapi di Indonesia kebangsaan sudah nyata 17 tahun sebelum kelahiran negara. Sumpah Pemuda 1928 membuktikan

bahwa perasaan "kami ini bangsa Indonesia" *sudah* betul-betul merasuk ke hati rakyat Indonesia.

Kekuatan rasa kebangsaan itu membuktikan diri 1998. Omongan sesudah runtuhnya Orde Baru tentang bahaya disintegrasi – mirip Uni Soviet dan Yugoslavia – tidak pernah punya dasar nyata (dengan kekecualian dua propinsi di ujung Barat dan Timur Indonesia yang memang sudah lama membawa masalah). Memang, kita kemudian mengalami banyak (terlalu banyak!) konflik, tetapi konflik-konflik itu biasanya dengan tetangga dan bukan dengan Indonesia.

Kekuatan kesadaran kebangsaan kelihatan dari kenyataan bahwa *mainstream* agama-agama di Indonesia **kokoh nasionalis**. Berhadapan dengan radikalisme agama yang mere-mehkan kebangsaan, dan semakin juga segala rasa kemanusiaan, kenyataan itu merupakan modal sosial amat penting bagi masa depan Indonesia. lihat saja Muhammadiyah, Sarekat Islam, Nadlatul Ulama, tetapi juga misalnya Perkempalan Katulik, mereka semua terbentuk dalam dinamika kebangkitan nasional. Mereka dengan sendirinya sekaligus agamis dan Indonesia.

2. PANCASILA

Akan tetapi rasa kebangsaan hanya akan dapat dipertahankan kalau satu syarat dipenuhi. Yaitu bahwa kita bersedia

saling menerima dan saling mengakui dalam kekhasan kita masing-masing. Bangsa Indonesia terdiri dari begitu banyak suku, etnik, budaya dan orientasi agama. Jadi mereka berbeda satu sama lain, namun bersatu dalam kebangsaan Indonesia. Kesatuan itu mengandaikan bahwa semua bersedia untuk saling menerima.

Nah, Pancasila tak lain adalah komitmen bangsa Indonesia untuk saling menerima dalam kekhasan masing-masing. Sehingga tak ada etnik, budaya, suku dan orientasi agama yang harus mengurbankan jadi diri untuk menjadi Indonesia. Indonesia hanya dapat tetap kuat apabila saudara sebangsa yang Muslim tak perlu kurang Muslim, yang Katolik tidak perlu kurang Katolik, yang Toraja tak kurang Toraja, dan penganut Kejawaen tak perlu menyembunyikan penghayatannya karena mereka semua bangsa Indonesia. Kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan itulah merupakan komitmen inti bangsa Indonesia dalam Pancasila.

Jadi Pancasila merupakan unsur kunci dalam kesatuan bangsa. Hanya kalau komitmen itu kita pegang, semua komponen bangsa akan bersedia untuk bersatu dalam satu bangsa dan negara. Meskipun komitmen sekarang terancam, akan tetapi dengan rasa syukur kita boleh melihat bahwa pada dasarnya dan pada garis besarnya konsensus dasar yang namanya Pancasila diterima oleh seluruh bangsa - dengan keke-

cualian barangkali 10 persen yang ekstrem, fundamentalis, picik-agamis, radikal dlsb.

Maka sekarang kita bertanya apa sebenarnya arti Pancasila. Di mana gigi-giginya?

II. MAKSUD PANCASILA

Pancasila adalah tekad dan kesepakatan dasar yang membuat bangsa Indonesia yang majemuk itu menjadi mungkin dan nyata. Maka itu bertanya: Apa yang dimaksud dengan Pancasila?

1. ARTI PANCASILA SEBAGAI KESELURUHAN

Pertama dapat dikatakan: Pancasila adalah nilai-nilai dasar, cita-cita dan norma-norma etika politik bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar. Nilai adalah apa yang dianggap baik dan berharga, yang dijunjung tinggi. Pancasila mengungkapkan apa yang paling dasar dijunjung tinggi dan dihargai bangsa Indonesia dalam hidup bersama. Katakan: hidup bersama akan terasa paling bagus semakin lima sila Pancasila menjadi kenyataan.

Cita-cita: Pancasila merumuskan cita-cita kehidupan bersama bangsa Indonesia. Pancasila belum terwujud dan barangkali tak pernah akan terwujud seratus persen. Pancasila

adalah cita-cita yang diusahakan, yang membimbing bangsa dalam kemajuannya, harapan masa depan bangsa.

Norma-norma etika politik bangsa Indonesia: Seluruh rencana, sikap dan tindakan politik bangsa Indonesia, entah dalam dimensi legislatif, entah dalam dimensi eksekutif yang sesuai dengan Pancasila. Jadi rencana-rencana, sikap dan tindakan politik harus diukur apakah sesuai dengan, serta memajukan realisasi cita-cita Pancasila. Segenap alokasi kekuasaan negara harus dapat dibenarkan dilihat dari Pancasila.

AKTUALISASI LIMA SILA PANCASILA

Dengan aktualisasi lima sila Pancasila di sini dimaksud menempatkan Pancasila ke dalam kerangka etika politik pasca tradisional. Etika politik tradisional ditentukan baik oleh kekhasan tradisi budaya maupun agama bangsa masing-masing. Tetapi dengan kesadaran khas modern bahwa di satu pihak masyarakat-masyarakat semakin kompleks dan majemuk, dan di lain pihak, karena itu, tatanan, etika dan nilai-nilai tradisional tidak lagi diakui oleh semua muncul, sejak abad ke-17, kesadaran akan suatu etika politik yang berdasarkan kemanusiaan manusia dan karena itu mengangkat klaim keberlakuan universal. Etika politik baru yang memperoleh akseptasi universal dalam pernyataan hak-hak asasi manusia PPB 1948 terdiri dari **empat prinsip inti**:

1. Kebebasan beragama.
2. Hormat terhadap hak-hak asasi manusia.
3. Demokrasi.
4. Keadilan sosial.

Ada unsur ke-5 yang bukan prinsip etis, melainkan pengandaian struktural yang sementara ini sudah memperoleh akseptasi universal dan tak terbantah, yaitu bahwa seluruh rakyat, bangsa dan masyarakat di dunia ditata dalam kerangka *negara nasional teritorial*. (Sebuah prinsip ke-6 baru sekarang semakin disadari, yaitu tuntutan untuk menjaga keutuhan lingkungan hidup. Berikut ini saya tidak membicarakannya.) Jadi negara di abad ke-20, apalagi di abad ke-21, adalah negara teritorial, sebuah *nation*, dan dari semua negara yang beradab dituntut bahwa orang bebas menentukan sendiri apakah beragama dan bagaimana ia beragama, bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar, bahwa pemerintahan ditentukan secara demokratis (dan tidak secara kediktatoran), dan bahwa mengusahakan keadilan sosial bagi semua menjadi tujuan kehidupan bangsa.

Nah, yang amat mencolok - dan merupakan bukti kejeniusan Bung Karno sebagai perumus pertama Pancasila - adalah bahwa Pancasila persis mengungkapkan lima unsur itu! Itu cukup mengherankan dan mengagumkan dan saya tidak tahu apakah ada bangsa lain yang dalam merumuskan dasar etis

kebangsaannya juga mengungkap lima unsur hakiki - dan, kecuali perhatian pada lingkungan hidup yang merupakan kesadaran baru, tidak ada unsur yang kurang di dalam Pancasila. Sila pertama jelas memuat kebebasan beragama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut penolakan terhadap kekerasan dan hormat terhadap martabat setiap orang sebagai manusia, sila keempat oleh Bung Karno sendiri pertama kali malah dirumuskan sebagai "**demokrasi**", sila kelima ya **keadilan sosial**, dan sila ke-tiga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara dalam arti modern, dalam arti negara teritorial-nasional. Mari kita sekarang melihat sila-sila masing-masing dengan lebih rinci.

(1) **Ketuhanan Yang Maha Esa** yang khususnya dirumuskan untuk menjamin agar tak ada diskriminasi atas dasar agama harus tegas-tegas menjamin **kebebasan beragama** dan **pluralisme ekspresi keagamaan**. Mewajibkan masyarakat untuk beragama menurut dalil-dalil tertentu – biarpun dianggap *ortodoksi* suatu agama – bertentangan dengan sila pertama itu. Orang di negara Pancasila tidak boleh dipaksa untuk beragama atau beribadat menurut model apa pun. Paham “ajaran sesat” adalah wajar kalau dipakai oleh agama yang bersangkutan, tetapi bagi negara Pancasila tak ada itu bahwa ajaran yang oleh mayoritas dianggap sesat, lalu negara tidak melindungi orang-orang itu dari ancaman dan kekerasan dan tidak menjamin hak asasi serta hak konstitusional mereka un-

tuk percaya serta beribadat menurut apa yang mereka yakini sebagai jalan Tuhan. Jelas bahwa segala kekerasan atas nama agama tidak boleh ditoleransi. Dengan KYME harus dianggap bertentangan penyebaran ideologi-ideologi ateis maupun ideologi-ideologi religius eksklusif yang mau memaksakan pandangan mereka kepada masyarakat.

(2) **Kemanusiaan** yang adil dan beradab menegaskan keadilan dan keberadaban sebagai dasar hidup bersama bangsa Indonesia. Itu, di satu pihak, berarti penolakan terhadap kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Secara sederhana: orang beradab tidak berkelahi dan tidak memakai kekerasan. Di lain pihak kemanusiaan yang adil beradab menuntut bahwa setiap orang, tanpa kecuali, dihormati dalam **harkat kemanusiaannya**. Itulah yang mau dijamin melalui *hak-hak asasi manusia* sebagaimana sekarang sudah ditetapkan dalam undang-undang dasar Republik kita ini. Hak asasi manusia merupakan operasionalisasi sikap hormat terhadap martabat setiap orang dan setiap kelompok orang sebagai manusia dan tidak terdisposisi. Maka hormat terhadap hak-hak asasi setiap orang sebagai manusia merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa dengan warga-warganya yang lemah.

Di sini perlu ditambah bahwa sejak puluhan tahun umat manusia semakin sadar bahwa **alam pun** wajib dihormati.

Kalau tidak, manusia menghancurkan dasar-dasar eksistensinya -keutuhan alam- sendiri. Kalau kita harus bersikap beradab terhadap manusia lain, kita hendaknya juga bersikap beradab terhadap alam.

(3) **Persatuan Indonesia** sudah jelas menegaskan cinta pada bangsa Indonesia. Di abad ke-21 nasionalisme harus cerah dan tidak picik, tidak dengan menutup diri dan melawan mereka yang di luar, melainkan dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan serta atas tekad untuk dalam kerjasama itu menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan dalam pengertian *bhinneka tunggal ika*. Di Indonesia rasa kebangsaan merupakan unsur penyeimbang terhadap eksklusivisme lokal maupun agamis. Cinta pada bangsanya sendiri termasuk keutuhan sosial seseorang.

(4) **Kerakyatan** yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan di abad ke-21 berarti komitmen tanpa ragu-ragu terhadap *demokrasi, demokrasi tanpa embel-embel*. Secara konkret komitmen itu berarti bahwa demokrasi yang kita miliki sekarang – yang kita ketahui masih mempunyai banyak kelemahan – wajib kita sukseskan. Menggerogoti demokrasi Indonesia sama dengan menggerogoti Pancasila.

(5) **Keadilan sosial** bagi seluruh rakyat Indonesia sudah jelas kita setuju semua sebagai tujuan perpolitikan Indonesia, tetapi dalam kenyataan masih jauh dari terlaksana. Sila itu berarti bahwa pengentasan kemiskinan serta pengentasan segenap diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Perpecahan vertikal bangsa: 40% bangsa maju terus, sedangkan 40% tetap miskin atau, sekurang-kurangnya tidak sejahtera, 20% di tengah-tengah, tidak boleh kita biarkan sama sekali. Lebih daripada sampai sekarang pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan mereka yang sampai sekarang ketinggalan. Hanya kalau kita berhasil menghapus kemiskinan dan segala diskriminasi dari bumi tanah air solidaritas bangsa Indonesia akan terwujud.

PENUTUP

Sebagai orang Kristiani tidak perlu kita mempunyai suatu etika politik khusus. Cita-cita Pancasila amat sesuai dengan bagaimana kita, dalam cahaya khotbah di gunung dan contoh Yesus, harus membangun kehidupan bersama. Kita boleh sepenuhnya mendukung dan berdiri di belakang Pancasila.

